

PENGEMBANGAN PERANAN WANITA DI PEDESAAN DAN ANTISIPASI KKN

Oleh

Siti Hamidah

Abstrak

Wanita pedesaan adalah sumber potensi nasional yang bisa menjadi kekuatan nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Wanita pedesaan dalam struktur kependudukan Indonesia menempati porsi yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan wanita perkotaan. Dengan demikian, secara kuantitatif wanita pedesaan adalah sumber kekuatan nasional, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga kerja. Namun, secara kualitatif masih dililit oleh berbagai permasalahan yang berkait dengan kesehatan, gizi, pendidikan, tenaga kerja dan kegiatan ekonomi yang memerlukan uluran berbagai pihak agar potensi yang dimiliki betul-betul bisa menjadi kekuatan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakat. Program KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dapat membantu memecahkan masalah-masalah wanita pedesaan dengan menempatkan diri sebagai motivator dan fasilitator yang mampu menyusun program-program aksi yang dapat (1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita pedesaan sesuai kebutuhan agar semakin mampu meraih peluang kerja yang tersedia, (2) meningkatkan kemandirian wanita dalam sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabat wanita sebagai manusia, (3) meningkatkan wawasan berpikir wanita pedesaan agar senantiasa mampu secara selaras, serasi dan seimbang menempatkan dirinya dalam mengemban peran ganda sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus juga mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi kesejahteraan keluarga.

Pendahuluan

Permasalahan yang berkaitan dengan wanita, dewasa ini tampaknya semakin mendapat perhatian, baik dari pihak pemerintah, perguruan tinggi ataupun organisasi yang berkaitan dengan wanita. Persoalan pokok yang dihadapi wanita selama ini adalah adanya anggapan bahwa belum sepenuhnya wanita terlibat dalam proses pembangunan. Secara kuantitatif

jumlah wanita relatif besar, pada tahun 1985 rasio laki-laki terhadap wanita adalah 99, sedangkan tahun 1990 menunjukkan angka 101. Dengan jumlah yang besar seharusnya wanita mampu mengambil kesempatan dalam berbagai aspek pembangunan. Mengamati kenyataan seperti ini ternyata secara kualitatif wanita masih menghadapi berbagai persoalan, seperti pendidikan, gizi, kesehatan, kesempatan kerja dan sebagainya. Program pemerintah yang selama ini ditujukan pada wanita antara lain sudah diarahkan untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera. Pelaksanaan program ini tentu saja memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak.

Mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang memiliki keberuntungan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, tidak bisa melepaskan diri dari kepeduliannya pada masalah pembangunan termasuk di dalamnya masalah kaum wanita. Berbagai cara dapat ditempuh, misalnya lewat program terstruktur seperti KKN. Seberapa jauh program KKN yang ada selama ini dapat memberi manfaat pada pembangunan wanita desa, tampaknya perlu terus diupayakan. Berbagai persoalan yang harus dijawab antara lain, bagaimana upaya mahasiswa KKN untuk meningkatkan kemampuan wanita pedesaan. Seberapa jauh program itu dapat memberi manfaat pada keluarga dan masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, tulisan ini akan membahas beberapa permasalahan wanita pedesaan dan peran serta mahasiswa KKN dalam pembangunan wanita pedesaan.

Beberapa Permasalahan Wanita

Permasalahan wanita selama ini berangkat dari suatu keadaan yang menempatkan bahwa wanita dibedakan dengan pria. Secara kodrati wanita memang berbeda dengan pria. Wanita dapat mengandung, melahirkan anak, sedang pria tidak dapat melakukan.

Secara psikologis wanita lebih emosional, pasif dan submisif (Arif Budiman, 1985:7). Keadaan ini menempatkan wanita berperan untuk melahirkan, membesarkan anak, membesarkan urusan rumah tangga, melayani kebutuhan suami, dan keperluan-keperluan lain yang berkaitan dengan sektor domestik. Laki-laki bertugas mencari nafkah untuk keluarga, atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sektor publik.

Kondisi seperti ini sudah berlangsung sangat lama. Permasalahan yang muncul antara lain, wanita menjadi tergantung terhadap laki-laki, kurang dihargai pengabdianannya untuk keluarga karena secara ekonomis tidak menghasilkan uang. Wanita merasa rendah diri disebabkan dirinya terbatas pada lingkup urusan rumah tangga, dan sedikit memperoleh informasi tentang dunia luar, juga wanita merasa tidak siap menggantikan peran sektor publik bila suatu saat suami meninggal.

Wanita dan laki-laki yang memang secara kodratnya berbeda membawa juga polarisasi yang membedakan wanita dan laki-laki dari segi yang lain. Wanita dianggap sebagai wanita bila mampu dan terampil mengurus rumah tangga secara benar. Sejak kecil anak-anak sudah diperkenalkan dengan pembagian kerja semacam ini. Dipandang aneh bila laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga kerana memang pekerjaan tersebut adalah pekerjaan untuk wanita, bukan laki-laki. Akibatnya, bila wanita membantu pekerjaan laki-laki, tetap juga wanita dibebani dengan pekerjaan yang dipandang sebagai urusan wanita. Dengan sendirinya curahan waktu dan tenaga wanita relatif semakin tinggi. Hasil penelitian Pujiwati Sayogyo (1983:51) tentang peranan wanita dalam perkembangan masyarakat desa, menunjukkan bahwa rata-rata jam kerja dalam sehari oleh wanita yang mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga, dibanding laki-laki (sampel pengamatan di desa Sumedang) menunjukkan: untuk golongan tidak mampu 9,6 jam berbanding 8,9 jam, golongan sedang 9,8 jam berbanding 8,7 jam, dan golongan mampu 10 jam berbanding 9,1 jam.

Sementara ini wanita yang memasuki sektor publik, belum sepenuhnya mendapatkan penghargaan yang selaras dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Upah yang diterima ada kalanya tidak sepadan atau berbeda dengan upah laki-laki. Perbedaan ini didasari suatu anggapan pekerjaan yang dilaksanakan wanita tidak memerlukan keterampilan khusus, atau wanita yang memasuki sektor publik pada umumnya wanita yang kurang berpendidikan. Hal ini sejalan dengan sistem kapitalisme yang berlaku antara buruh dan majikan dalam pembagian keuntungan, pemilik modal akan mendapat bagian jauh lebih besar karena modal dianggap lebih berharga daripada tenaga kerja (Arief Budiman, 1991:4).

Ada anggapan bahwa wanita adalah manusia kelas dua sehingga muncul perilaku mengeksploitasi wanita oleh laki-

laki. Keadaan ini sudah berlangsung sangat lama, wanita tidak berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki. Sejarah masa lalu telah menunjukkan berbagai bangsa memperlakukan wanita dengan semena-mena, wanita dipandang boleh dijual, dibeli, diperdagangkan, boleh dipusakan, dihadiahkan, boleh dipukul, boleh disiksa, dan sebagainya (Moennawar Khalil, 1977:38).

Dari segi kesehatan tampaknya budaya makan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan wanita. Berbagai kasus seperti distribusi makan yang menganut skala prioritas, pada umumnya wanita, ibu rumah tangga, mendapat prioritas paling bawah. Keadaan ini akan lebih berbahaya, bila ibu dalam keadaan hamil atau menyusui (Suhardjo, 1989:16). Diberlakukan tabu terhadap jenis makanan tertentu untuk wanita yang sebenarnya merugikan dari segi gizi. Juga beban kerja yang tidak sepadan dengan kondisi badan, misalnya buruh gendong, pekerjaan membawa barang berat di atas kepala dan masih banyak lagi.

Berkaitan dengan pendidikan, walaupun secara hukum wanita memperoleh hak yang sama dengan pria dalam hal pendidikan, tampaknya masih saja terjadi wanita yang tidak sempat mengenyam pendidikan karena sesuatu hal. Biasanya berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bila dalam keluarga tidak dimungkinkan biaya untuk menyekolahkan, anak wanitalah yang biasanya harus mengalah, prioritas utama jatuh pada yang laki-laki. Demikian juga pandangan usia kawin, anak gadis tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, sudah saatnya menikah begitu menginjak usia dewasa. Dalam indikator sosial wanita Indonesia tahun 1991, hal.v, menunjukkan bahwa tahun 1985 di perkotaan 29,78% wanita melangsungkan perkawinan pertama pada usia di bawah 16 tahun, sedang di pedesaan jauh lebih tinggi, mencapai 39,90%.

Wanita di Pedesaan

Permasalahan wanita di pedesaan tampaknya hampir sama dengan wanita-wanita pada umumnya. Dalam hal ini meliputi, misalnya kesehatan, gizi, pendidikan, tenaga kerja dan khususnya kegiatan ekonomi (Pujiwati Sayogyo, 1983:1). Di lihat dari jumlah penduduk wanita berumur 10 tahun ke atas, yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan menun-

jukkan perbandingan 16424,4 berbanding 44697,4 (indikator sosial wanita Indonesia, 1991:4-11). Ternyata jumlah penduduk wanita di pedesaan yang besar tidaklah cukup bila tidak diikuti kualitas yang memadai. Dengan demikian, wanita pedesaan harus dikembangkan agar menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk pembangunan.

Persoalan yang dihadapi wanita sebenarnya merupakan lingkaran yang kadang-kadang sulit dipecahkan. Lebih-lebih bila permasalahan itu bersumber dari kemiskinan. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Kemiskinan ----> konsumsi makan tidak seimbang ---> status gizi rendah ---> tingkat kesehatan menurun ---> pertumbuhan badan terhambat ---> proses belajar lambat ---> tingkat pendidikan rendah ---> peluang kerja rendah ---> pengangguran ---> kemiskinan, dan seterusnya (Suhardjo, 1989:197).

Partisipasi wanita pedesaan dalam dunia pendidikan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Walaupun sebagian besar dari wanita pedesaan terbatas pada sekolah dasar, dan sebagian lagi SLTP, SLTA, tetapi dari jumlah 62,2 juta wanita tahun 1986, yang tidak sekolah dan tidak tamat SD, 63,52% tahun 1989 menurun menjadi 50,86% (indikator sosial wanita Indonesia 1991:vi). Akan tetapi, jumlah ini masih sangat besar dan perlu semakin diperkecil untuk kemudian sudah tidak ada lagi wanita pedesaan yang tidak pernah mengenyam pendidikan dasar. Implikasi dari keadaan ini diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan wanita di pedesaan. Yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Peran Ganda pada Wanita

Ketergantungan wanita atau eksploitasi kaum perempuan oleh laki-laki atau diperhalus, pembagian kerja yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki (Arief Budiman, 1991:1), semakin disadari sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. Persoalan ini dianggap sebagai keadaan yang membatasi gerak wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Mengatasi masalah ini tampaknya tidak begitu mudah. Namun, pendidikan wanita yang semakin membaik yang membawa peningkatan pengetahuan dan keterampilan

telah membawa kemandirian berpikir dan keberanian kaum wanita untuk meraih sektor kerja yang secara ekonomi makin dipandang sebagai menguntungkan. Sektor kerja semakin menjadi pilihan wanita di samping juga sebagai ibu rumah tangga. Dengan sendirinya wanita akan berperan ganda, di samping sebagai tenaga kerja penyumbang ekonomi keluarga, juga sebagai ibu rumah tangga. Untuk peran yang terakhir ini secara budaya dipandang sebagai peran melekat yang sementara ini masih didominasi oleh wanita.

Persoalan yang muncul dengan peran ganda ini adalah beban ganda pada wanita. Sebenarnya, untuk wanita pedesaan beban ganda ini sudah berlangsung lama, terutama karena tekanan ekonomi. Hanya saja peluang bekerja pada wanita desa sangat terbatas karena tingkat pendidikan rendah. Ada kalanya mereka bekerja di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga, bila wanita tersebut memiliki anak balita, anak tersebut dibawa ke tempat bekerja. Mereka belum terbiasa menggunakan jasa orang lain untuk mengurus anak atau rumah tangga. Paling-paling mereka menggunakan jasa keluarga.

Lain halnya bila tingkat pendidikan semakin tinggi, maka kesempatan bekerja semakin beragam. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga semakin banyak. Misalnya, siapa yang dilimpahi mengurus pekerjaan memasak, mencuci, mengurus anak dan sebagainya. Berapa lama mereka bekerja, apakah perlu menggunakan jasa orang lain dengan imbalan uang, dan seterusnya. Walaupun disadari bahwa peran ganda membutuhkan beban ganda, tetapi semakin menjadi pilihan. Karena, ada keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu kemandirian bidang ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihromi dkk. (1990:166) wanita yang berperan ganda dilatarbelakangi alasan-alasan, seperti punya penghasilan sendiri, menambah penghasilan keluarga, mengejar karier, memanfaatkan ilmu, mewujudkan cita-cita, hobi, menambah pengalaman. Selain itu, beberapa keuntungan yang dapat dirasakan, seperti wanita menjadi lebih siap bila sewaktu-waktu berperan sebagai kepala keluarga karena perceraian ataupun kematian. Secara psikologis wanita merasa lebih dihargai potensinya karena memiliki nilai ekonomis.

Mahasiswa KKN dan Wanita Pedesaan

KKN merupakan program kurikuler. Selama ini sebagian besar pelaksanaannya berada di pedesaan. Kehadiran mahasiswa KKN dapat menumbuhkan dinamika kehidupan masyarakat bila disertai keterlibatan secara langsung anggota masyarakat. Peranan mahasiswa KKN adalah membantu masyarakat pedesaan dalam memecahkan berbagai persoalan pembangunan (Juklak KKN IKIP Yogyakarta, hal.2). Baik pembangunan yang berdimensi fisik maupun psikis. Apabila program KKN hendak disinkronkan dengan arah pembangunan nasional, maka ada porsi-porsi pembangunan wanita yang perlu untuk menjadi pusat perhatiannya. Dalam GBHN ditegaskan bahwa:

1. Wanita sebagai warga negara dan sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.
2. Peranan wanita dalam pembangunan berkembang secara selaras dan serasi dengan tanggung jawab dan peranannya dalam keluarga (Bahan penataran mahasiswa, hal.145).

Dengan demikian, mahasiswa KKN memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan suasana ataupun situasi keikutsertaan wanita dalam proses pembangunan maupun penikmat hasil pembangunan baik untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Keadaan ini dapat dicapai dengan dimilikinya kemampuan memahami persoalan yang dihadapi wanita pedesaan baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai anak gadis, dengan tetap memperhatikan norma sosial budaya setempat.

Sejalan dengan pemikiran di atas bawah jumlah terbesar wanita tinggal di pedesaan, sebagian besar berpendidikan sekolah dasar, mata pencaharian keluarga sebagian besar petani, sebagian besar wanitanya kawin dalam usia muda, dan ada kecenderungan pada wanita untuk melepaskan diri dari ketergantungan sektor domestik atau urusan rumah tangga cukup luas, maka kemandirian wanita yang dapat ditumbuhkan bisa berkaitan dengan bidang ekonomi dengan tetap menye-laraskan peran wanita dalam keluarga.

Mahasiswa KKN sebagai tenaga penggerak pembangunan dapat menempatkan diri sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai fasilitator mahasiswa bisa memberikan peran yang

bersifat memberikan jalan pemecahan yang tetap memperhatikan keserasian antara keterlibatan wanita sebagai sumber daya ekonomi rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, wanita di samping memiliki tanggung jawab penuh dalam menumbuhkan kesadaran perlunya dimiliki kemampuan mandiri dalam bidang ekonomi juga tetap memiliki rasa tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

Salah satu program aksi yang penting diupayakan adalah pendidikan keterampilan wanita menuju kewiraswastan. Program ini lebih mudah dilaksanakan bila bekerja sama dengan lembaga penggerak wanita tingkat desa, seperti PKK ataupun PKK remaja. Walaupun PKK ataupun PKK remaja mungkin memiliki program dengan tujuan sama, tetapi adanya mahasiswa KKN ini akan dapat memberi warna baru ataupun variasi program yang dapat menampung aspirasi ragam kebutuhan wanita pedesaan.

Program pendidikan keterampilan wanita yang dikembangkan tetap mengacu pada kemampuan yang ada pada wanita pedesaan. Seperti, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, ketersediaan waktu yang ada pada wanita mengingat wanita pedesaan masih memiliki tanggung jawab pada urusan rumah tangga, minat dan sebagainya. Selain itu, akan lebih baik apabila program yang dibuat menggunakan bahan baku yang ada di sekitarnya sehingga biaya produksi dapat ditekan. Sesuatu hal yang tidak dapat dilupakan adalah barang yang diproduksi memiliki kelayakan untuk dijual mengikuti selera dan daya beli konsumen, jangan tergesa-gesa mengejar keuntungan, dan lain-lain.

Program itu meliputi, antara lain memasak untuk usaha, baik partai besar maupun kecil, kue-kue, lauk pauk, berbagai masakan seperti membuat sayur dan sayuran. Teknologi makanan dan minuman, misalnya membuat tempe, sirup, selai, berbagai makanan awet. Sanitasi dan hygiene makanan dan usaha, manajemen usaha, kiat wiraswasta dan masih banyak lagi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik desa.

Persoalan lain yang muncul adalah permodalan. Untuk itu perlu dijalin kerja sama dengan koperasi desa, menginduk pada usaha yang sudah ada, mengumpulkan dana secara gotong royong. Dan yang penting harus ditumbuhkan kebera-

nian untuk mengembangkan usaha. Pelaksanaan program dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain:

1. Dimulai dengan pendidikan keterampilan wanita kepada kader-kader PKK, diteruskan dari kader ke warga, kemudian pembentukan kelompok wiraswasta atau secara individual.
2. Langsung ke warga yang membutuhkan lewat organisasi PKK, kemudian dimunculkan keinginan untuk berwiraswasta baik secara individu maupun kelompok.

Keuntungan dengan cara ini, ada keterlibatan dari kader PKK. Untuk monitoring dan mengevaluasi program. Dengan demikian, dapat segera diketahui apakah program itu perlu dikembangkan, diganti, ataupun diteruskan.

Hasil evaluasi lapangan ini akan membantu penyusun program selanjutnya. Mengingat kehadiran mahasiswa KKN selama dua bulan efektif di lapangan dan dapat dilanjutkan periode berikutnya, maka penyusunan program selanjutnya akan lebih efektif. Dengan cara ini berbagai keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Mengurangi waktu untuk observasi lapangan.
2. Penempatan mahasiswa KKN dapat disesuaikan, yaitu antara keahlian bidang studi mahasiswa dengan kebutuhan lapangan.
3. Lebih jauh, apabila program itu telah mapan dapat dikembangkan paket pendidikan keterampilan wanita pedesaan untuk digunakan secara lebih luas.
4. Program yang telah mapan dapat dipakai sebagai model pengembangan desa KKN yang berorientasi pendidikan keterampilan wanita menuju kewiraswastaan.

Penutup

Mengingat luasnya permasalahan wanita di pedesaan dan berbagai keterbatasan yang ada pada wanita, maka kemandirian bidang ekonomi tampaknya merupakan salah satu alternatif pemecahan, dengan tetap menyelaraskan peran wanita sebagai ibu rumah tangga.

Mahasiswa KKN dipandang sebagai tenaga penggerak pembangunan, dapat membantu menangani kemandirian wanita bidang ekonomi melalui pendidikan keterampilan wanita menuju kewiraswastaan.

Dengan program pendidikan keterampilan wanita menuju kewiraswastaan ini diharapkan wanita pedesaan mampu meningkatkan penghasilan keluarga yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan gizi keluarga sehingga akan meningkatkan kualitas hidup generasi berikutnya.

Daftar Pustaka

- Anonim. *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penatar UUD 1945, P4, GBHN*.
- Anonim. *Juklak KKN IKIP Yogyakarta*.
- Arief Budiman. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT Gramedia.
- Arief Budiman. 1991. *Ketergantungan Perempuan dan Manifestasinya*. Kajian Pustaka. Lokakarya Nasional Citra Kemandirian Perempuan Indonesia, KSW Pusat Penelitian Unbraw, Malang, 18-20 Juli 1991.
- Moenawir Chalil. 1977. *Nilai Wanita*. Solo: Romadhoni.
- Nani Soewando. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pujiwati Sayogyo. 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suhardjo. 1989. *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Bogor: PAU IPB Bogor.
- Suhardjo. 1989. *Sosial Budaya Gizi*. Bogor: PAU IPB Bogor.
- Tapi Omar Ihromi. 1990. *Laporan Penelitian, Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, UI.
- Indikator Sosial Wanita Indonesia*. 1991.